


	News Title : Perkuat Ekonomi Digital, Pemerintah Kembangkan Perdagangan Aset Kripto	
	Media Name : kominfo.go.id	Journalist : Viska
	Publish Date : 06 January 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Berita Pemerintahan	Topic : Ekonomi Digital

06 Berita Pemerintahan Perkuat Ekonomi Digital, Pemerintah Kembangkan Perdagangan Aset Kripto

Kompas Berita Pemerintahan | Viska



Jakarta Pusat, Kominfo - Pemerintah terus berkomitmen memperkuat pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Didid Noordiatmoko menegaskan berbagai kebijakan strategis dibuat untuk mendorong tumbuhnya kegiatan pengembangan usaha inovasi komoditas digital serta kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bertransaksi. Salah satunya melalui pengembangan aset kripto.

"Perdagangan aset kripto dapat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mempromosikan, menciptakan, dan mendorong upaya pengembangan ekonomi digital Indonesia pada 2023," ujar Didid di Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2023).

Selama 2022, Bappebti telah memberikan perhatian berupa tanda daftar sebagai calon pedagang fisk aset kripto kepada 25 perusahaan untuk dapat melakukan perdagangan di pasar fisk aset kripto. Bappebti juga telah memberikan izin aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisk aset kripto sebanyak 883 jenis. Dari jumlah tersebut, 10 aset kripto di antaranya merupakan coin anak bangsa atau lokal.

Seiring dengan penguatan Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan dan pengawasannya kegiatan di sektor inovasi teknologi, sektor keuangan digital dan aset kripto menjadi tanggung jawab Komisi Jasa Keuangan (KJK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini aset kripto beralih dari Bappebti ke OJK.

"Dengan terbentuknya UU PSK tersebut, Bappebti akan melakukan peninjauan substansi 899 masa transisi, antara lain memvalidasi identitas legalitas, kepatuhan, dan mekanisme pengalihan, sertifikasi, pemilikan, perjanjian, dan pengawasan tetap dilakukan Bappebti dengan masa peralihan dua tahun diatur dalam Instruksi Pemerintah (IP) dan Perpresunan IP dalam enam bulan," terang Didid.

Transaksi F&E Tumbuh Rp51 Triliun

Pengembangan ekonomi digital juga ditunjukkan dengan kinerja Perdagangan Berjangka Komoditi (PBR) yang sangat signifikan. Dalam perdagangan secara notional value, PBR mengalami tren kenaikan. Total nilai transaksi pada periode Januari–November 2022 sebesar Rp51,51 triliun dengan rata-rata transaksi bulanan bulannya sebesar Rp4,58 triliun. Total nilai transaksi pada periode Januari–November 2022 meningkat sebesar 130,8 persen dibandingkan periode yang sama pada 2021 sebesar Rp17,51 triliun (UPI).

"Nilai transaksi PBR November 2022 tercatat sebesar Rp3,60 triliun. Sedangkan volume transaksi PBR November 2022 sebesar 1.283.083,7 lot atau meningkat 21 persen," ujar Didid.

Selain aset kripto, Bappebti juga mengatur perdagangan fisk emas digital. Pengaturan perdagangan fisk emas digital dilaksanakan sebagai upaya perdagangan fisk emas digital di Indonesia sebagai upaya mengoptimalkan minat investor. Daya tarik perdagangan emas digital antara lain Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Fisk Emas Digital di Bursa Berjangka. Kelemahan dalam perdagangan fisk emas digital yang telah membuat Bappebti berdiskusi dengan bursa berjangka, dua lembaga kliring, dua tempat pengalihan penyelesaian emas, tempat pedagang fisk emas digital, dan satu perusahaan perdagangan emas digital.

Pada Januari–November 2022, transaksi perdagangan fisk emas digital belum terdapat transaksi di exchange dan seluruhnya merupakan transaksi off exchange. Perkembangan transaksi perdagangan fisk emas digital asset di exchange dari nilai transaksi dan volume transaksi mengalami peningkatan. Tak hanya emas, untuk mewujudkan pemberian referensi harga, Bappebti juga mengatur perdagangan fisk timah murni dengan di Bursa Berjangka.

Dasar hukum perdagangan fisk timah murni adalah di Bursa Berjangka antara lain Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4/MMD/Per/2014 dan Peraturan Bappebti No. 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Murni Berjangka Komoditi Bursa Timah.

Kelemahan pada perdagangan fisk timah murni botangan yang telah berisikan Bappebti yaitu PT Bursa Berjangka Jakarta (PBJ) yang memiliki anggota dalam perdagangan fisk timah berupa 11 peserta jual dan 14 peserta beli yang mulai bertransaksi pada 2018. Terjadi pada PT Bursa Komoditi dan Derivat Indonesia (DCKI) yang memiliki anggota 56 peserta jual dan 41 peserta beli yang mulai bertransaksi pada 2019.

Waspada PBR Ilegal

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko meminta masyarakat terus waspada hal-hal yang dapat merugikan masyarakat. Saat ini seiring perkembangan teknologi, terdapat modus kejahatan PBR ilegal.

"Ada kegiatan ilegal seperti kegiatan saling berjangka, perusahaan pedagang aset kripto dan pedagang emas digital tanpa izin atau Bappebti yang menyerupai bonor pedagang berjangka serta melakukan penawaran investasi kelekak PBR," tegas Didid.

Berkaitan dengan hal itu, Bappebti telah membuat aturan dan kebijakan terkait PBR dan hal-hal lain yang sering dengan berkembangnya teknologi, khususnya dalam pasar global usaha. Bappebti juga terus melakukan pengendalian pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi. Pasar fisk bermula aset terbeli harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal perdagangan pada periode 2022–November 2022 Kementerian Perdagangan bersama pihak kepolisian RI telah melakukan sejumlah penindakan yang dilaku melakukan penghapusan dana melalui investasi ilegal.

Selain upaya di atas, Bappebti juga membuat Layanan Pengaduan Bappebti Call Center Bappebti – LNH. Ketersediaan LNH Bappebti bertujuan untuk mempermudah masyarakat dan keluhan masyarakat terhadap informasi PBR, SRG dan F&E. Bappebti Perkuat Kerja Sama Dalam upaya optimalisasi kerja dan meningkatkan ekosistem bisnis yang sehat, Bappebti melakukan kerja sama dengan kementerian, lembaga, dan swasta.

Kerja sama telah dilakukan antara lain dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN RI), Kuartal Negeri dan Analisis Transaksi Keuangan (PTAK), Google Indonesia, dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Selain itu, Bappebti juga menjadi salah satu anggota dalam Segor Waspada Investor serta mendukung kegiatan Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force (FATF) yang diluncurkan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM dalam rangka pemertanian perdagangan Indonesia menjadi anggota dalam FATF. Didid mengemukakan, Bappebti juga telah membuat Korangga Ragu yang dibuat sebagai lembaga perantara yang berfokus dan informasi penting lainnya yang relevan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan berjangka komoditi.

Adapun Regulatory Outlook Bappebti 2023 adalah memonitoring UU PSK secara komprehensif looking memetakan seluruh aset kripto dan volume underlying crypto secara dalam masa transisi selama dua tahun ke depan. Bappebti tetap akan menjaga industri ini agar tetap berkembang dan perlindungan masyarakat tetap terjaga. Penguatan Bidang SRG Energi Selain New Griding SRG juga meningkatkan. Dibandingkan 2022, sampai saat ini terdapat barang yang dapat dibelikan terdapat SRG yang mencapai 20 komoditas, baik komoditas pangan pertanian, perikanan, perikanan dan pertambangan. Sementara itu, pelaksanaan SRG dilakukan baik dengan memanfaatkan gudang yang dibangun pemerintah maupun gudang milik swasta/UM.

Saat ini terdapat 102 gudang SRG, baik yang dibangun pemerintah maupun gudang milik swasta/UM dan telah dilakukannya 144 ladang/teksi yang terdapat di 29 provinsi di Indonesia. Tercatat total terdapat 113 pengalihan gudang SRG yang telah melakukan penanaman dan Bappebti. Sedangkan pemakai SRG berasal dari cluster perikanan yang terdiri atas petani dan nelayan dengan proporsi 84 persen, kemudian dari dalam kelompok pertambangan dan perikanan sebesar 14 persen, dan sisanya sebesar 2 persen berasal dari cluster pelaku usaha, baik itu eksportir, pedagang, maupun usaha pengalihan.

Pada 2022, nilai transaksi terdapat mencapai Rp1,27 triliun atau tumbuh sebesar 147 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, nilai penanaman berbasis SRG juga mengalami peningkatan dan tercatat pada 2022 nilai penanaman yang diumumkan mencapai Rp819 miliar," ungkap Didid.

Kerjasama Komoditi Sektor Didid Noordiatmoko, Kepala Bappebti, Kerjasama Komoditi Sektor Rp25,5 miliar. Nilai ini merupakan rekor atau peningkatan pasar Kerjasama Komoditi Sektor dengan peningkatan perdagangan berjangka komoditi mencapai 101 kali. Di sisi yang lain, pada 2022, angka partispasi pelaku usaha yang terlibat F&E juga menunjukkan peningkatan.

Peserta yang tercatat mencapai 2.300 peserta dari kelompok pelaku usaha baik petani produsen, pedagang, PBR, maupun pelaku usaha pengolahan. Terkat F&E, beberapa hal yang akan dilakukan Bappebti pada 2023 adalah memfasilitasi kebutuhan legalitas dan mengoptimalkan di bidang SRG dan F&E yang dapat meningkatkan nilai usaha yang kondusif dan kompetitif. Antara lain regulasi terkait penyederhanaan kepatuhan SRG dan F&E, serta lembaga penyelesaian sengketa SRG, dan dalam sisi ini Bappebti akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah secara multistakeholder para pelaku usaha yang menjadi sasaran dari kebijakan SRG dan F&E. Sedangkan untuk mendukung transparansi data sistematis kepatuhan di bidang SRG, SRG, dan F&E akan penyalahgunaan data kepatuhan, Bappebti telah melakukan penandatangan Berjangka Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Didid, P&S ini terkait pematerian nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik dalam lingkup Bappebti. Didid menambahkan, P&S tersebut merupakan lebih khusus layanan perantara dan penguatan terhadap pelaku usaha yang bertransaksi dalam Bappebti serta dalam proses pemerintahan nasional dan/atau pelayanan oleh pelaku usaha yang berada di bawah naungan Bappebti. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan kepatuhan dilaksanakannya transaksi legal seperti transaksi pembelian, jual, dan penjualan komoditas.

Dengan adanya P&S ini, kepatuhan dapat mendukung perkembangan layanan di bidang SRG, SRG, dan F&E. Seluruh layanan berjangka, lembaga kliring, dan asuransi yang terdapat di Bappebti akan berkolaborasi untuk mendukung implementasi P&S ini dan dapat meningkatkan kapabilitas seluruh anggotanya.

"Selain itu, pada 2023, Bappebti akan memperkuat teras, promosi, sosialisasi, edukasi, dan belajar sama dengan influencer untuk mempromosikan bidang F&E, pasar fisk emas digital, aset kripto, dan timah kepada masyarakat," pungkas Didid.